



RANCANGAN AKHIR
RENJA
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024

**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini tersusun berkat kerjasama semua pihak, dan melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan dan partisipasinya.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja (Renja) ini belum sempurna dan mungkin belum sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan isi dan substansinya, kami mohon maaf dengan harapan dapat menerima masukan untuk perbaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) pada masa yang akan datang.

Semoga dokumen ini berguna dalam proses perencanaan anggaran untuk tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 21 Juli 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan,**



Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19650909 198602 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penyusunan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	49
C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	72
A. Catatan Penting	72
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	72
C. Rencana Tindak Lanjut	72

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dinas sebagai bagian dari perangkat daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bahwa yang menjadi urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran di daerah adalah urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan urusan pemerintahan.

Berdasarkan peraturan tersebut maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan melalui pengkajian kondisi empiris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, hal ini tentang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran pada Rencana Kerja. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program/kegiatan, target indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk kemudian akan dijabarkan lebih lanjut pada rencana kerja SKPD setiap tahunnya. Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena rencana kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan kegiatan tahunan ke dalam langkah yang lebih konkrit dan terukur. Oleh karena itu rencana kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Kualitas dokumen rencana kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, yang pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100) ;

24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 90);
27. Peraturan Gubernur Renstra Nomor 015 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Berita Daerah tahun 2022 Nomor 15 Tanggal 30 Maret 2022
28. Peraturan Daerah RPJMD Nomer 2 Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022, Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan secara konkrit dan terukur selama kurun waktu satu tahun, dalam penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024.

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi, maka rencana strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

a. Maksud

Penyusunan rencana strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara

sinergisitas.

b. Tujuan

1. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi SKPD.

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Visi yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

“KALIMANTAN SELATAN MAJU (MAKMUR, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN)”

Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudi Pekerti Luhur;
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata;
3. Memperkuat Sarana Dan Prasarana Dasar Dan Perekonomian;
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Fokus Pada Pelayanan Publik;
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Pembangunan Kalimantan Selatan pada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, merupakan dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang fokus pada pemantapan fondasi pembangunan daerah, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJP Daerah dan juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD memiliki peran pada misi misi keempat yaitu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Fokus Pada Pelayanan Publik, dengan prioritas mendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal, pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana dan perlindungan masyarakat. Peran yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pencapaian Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Visi RPJMD Terkait RPJMD	Misi RPJMD Terkait Satpol PP dan Damkar	Sasaran RPJMD Terkait Satpol PP dan Damkar	Indikator RPJMD Terkait Satpol PP dan Damkar
1	2	4	5
Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera, Dan Berkelanjutan	<p>Misi ke empat: Meningkatkan etos kerja, moralitas, sikap, disiplin dan kreatifitas serta keperdulian kepada masyarakat dengan ketenteraman dan ketertiban umum untuk Kalsel Aman</p> <p>Prioritas: Mendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal, pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana dan perlindungan masyarakat</p>	Mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan mengurangi dampak bahaya kebakaran	<p>1. Tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah</p> <p>2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran</p>

D. Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan, berisi **latar belakang** berupa pengertian ringkas tentang: Rencana kerja (Renja) SKPD, proses penyusunan rencana kerja SKPD, keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan dokumen RKPD, rencana strategis (Renstra) SKPD, dengan rencana kerja K/L dan rencana kerja Provinsi

dan rencana kerja Kabupaten/Kota, tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, dengan menyebutkan **landasan hukum** berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, penetapan SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD.

Menjelaskan **maksud dan tujuan** penyusunan rencana kerja SKPD sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan SKPD. Selain itu memaparkan **sistematika penulisan** yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana kerja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun lalu, dan realisasi rencana strategis SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

b. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja rencana strategis SKPD. Penjabaran dan rekapitulasi program dan kegiatan dengan mempertimbangkan perumusan program.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menjelaskan mengenai program dan kegiatan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Bab ini juga disajikan tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja rencana strategis SKPD.

Bab V Penutup, uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah pelaksanaan rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan tanda tangan Kepala SKPD serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator sasaran dengan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Hasil pengukuran dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis SKPD sampai dengan Tahun 2023

Tabel T- C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Selatan (menggunakan permendagri 13)

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-1)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN									

	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Keseekretariatan	600	100	100	100	100	100	300	50%
5.1.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	600	100	100	100	100	100	300	50%
5.1.1.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	10 Laporan	33%
5.1.1.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
5.1.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran Satpol PP & Damkar	600	100	100	100	100	100	300	50%
5.1.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 bulan	12 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	26 bulan	31%
5.1.1.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
5.1.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP &	600	100	100	100	100	100	300	50%

		Damkar														
5.1.1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	480	Stell	80	Stell	80	Stell	80	Stell	100%	80	Stell	160	Stell	33%
5.1.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	600		100		100		100		100	100		300		50%
5.1.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	24	bulan	33%
5.1.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	24	bulan	33%
5.1.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	24	bulan	33%
5.1.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	24	bulan	33%
5.1.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	24	bulan	33%
5.1.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	600		100		100		100		100	100		300		50%

		Satpol PP & Damkar								
5.1.1.1.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	30 Unit	6 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	5 Unit	10 Unit	33%
5.1.1.1.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	126 Unit	0 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	21 Unit	20 Unit	16%
5.1.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	78 Unit	11 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	13 Unit	25 Unit	32%
5.1.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	600	100	100	100	100	100	300	50%
5.1.1.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
5.1.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
5.1.1.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	600	100	100	100	100	100	300	50%

5.1.1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
5.1.1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
5.1.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	600	100	100	100	100	100	300	50%
5.1.2.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti	600	100	100	100	100	100	300	50%
5.1.2.1.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	9600 0 Patroli	1600 0 Patroli	1600 0 Patroli	1600 0 Patroli	100%	1600 0 Patroli	3200 0 Patroli	33%

5.1.2.1.01.2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	750	Kasus	0	Kasus	150	Kasus	9	Kasus	6%	150	Kasus	9	Kasus	1%
5.1.2.1.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0!	0	Dokumen	0	Dokumen	0%
5.1.2.1.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	360	Orang	50	Orang	60	Orang	60	Orang	100%	60	Orang	110	Orang	31%
5.1.2.1.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	810	Orang	135	Orang	135	Orang	135	Orang	100%	135	Orang	270	Orang	33%

5.1.2.1.01.6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	78	Kab/Kota	13	Kab/Kota	13	Kab/Kota	13	Kab/Kota	100%	13	Kab/Kota	26	Kab/Kota	33%
5.1.2.1.01.7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	65	Unit	0	Unit	7	Unit	7	Unit	100%	13	Unit	7	Unit	11%
5.1.2.1.01.8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5	SOP	0	SOP	1	SOP	1	SOP	100%	1	SOP	1	SOP	20%
5.1.2.1.01.9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	65	Kab/Kota	0	Kab/Kota	13	Kab/Kota	13	Kab/Kota	100%	13	Kab/Kota	13	Kab/Kota	20%
5.1.2.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah	600		100		100		100		100	100		300		50%
5.1.2.1.02.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	600	Orang	100	Orang	100	Orang	100	Orang	100%	100	Orang	200	Orang	33%

5.1.2.1.02.2	Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1000	Kasus		200	Kasus	200	Kasus	100%	200	Kasus	200	Kasus	20%	
5.1.2.1.02.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1200	Kasus	100	Kasus	200	Kasus	200	Kasus	100%	200	Kasus	300	Kasus	25%
5.1.2.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase petugas ppns/sekr dalam penyelidikan dan penyidikan Pertahun	600		100		100		100		100		300		50%	
5.1.2.1.03.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	25	PPNS	0	PPNS	5	PPNS	3	PPNS	60%	5	PPNS	3	PPNS	12%

5.1.2.1.03.2	Pemberkasan Administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	1000	Kasus	0	Kasus	200	Kasus	144	Kasus	72%	200	Kasus	144	Kasus	14%
5.1.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	600		60		60		60		100	60		180		30
5.1.4.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil	600		100		100		100		100	100		300		50%
5.1.4.1.01.1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	78	Kab/Kota	13	Kab/Kota	13	Kab/Kota	13	Kab/Kota	100%	13	Kab/Kota	26	Kab/Kota	33%
5.1.4.1.01.3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	600	Orang	50	Orang	100	Orang	100	Orang	100%	100	Orang	150	Orang	25%

		Provinsi dan Kabupaten/Kota								
5.1.4.1.01.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0%

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tujuan program ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu melaksanakan patroli pengamanan objek vital Pemerintah Provinsi dan pengamanan dan pengawalan pejabat Negara, mensosialisasikan tentang penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait sanksi administrasi dan pidana serta memfasilitasi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Dengan target program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 100% dan capaian realisasi n-1 sebesar 100% dengan metode pengumpulan data memperbaiki kuesioner yang berarti sudah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah. Berikut kegiatan yang mendukung Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum antara lain:

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan dengan nilai pagu Rp. 15.060.034.630, Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan nilai pagu Rp. 99.996.400, Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dengan nilai pagu Rp. 100.000.000, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan nilai pagu Rp. 1.022.879.800, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan nilai pagu Rp 1.026.183.585, Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dengan nilai pagu Rp 99.999.750, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum dengan nilai pagu Rp 184.638.000, Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan nilai pagu Rp 15.609.800 serta sub kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan nilai pagu Rp 60.000.000, dengan target capaian

persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindaklanjuti sebesar 100% dan capaian realisasi n-1 kegiatan sebesar 100%.

- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan nilai pagu Rp 88.348.100, Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan nilai pagu Rp 98.666.900, Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan nilai pagu Rp 126.035.800, dengan target capaian persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah sebesar 100% dan capaian realisasi n-1 kegiatan sebesar 100%.
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan nilai pagu Rp 50.000.000, Pemberkasan Administrasi Penyelidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dengan nilai pagu Rp 80.000.000, dengan target capaian Persentase petugas ppns/sekr dalam penyelidikan dan penyidikan Tahunan sebesar 100% dan capaian realisasi n-1 kegiatan sebesar 100%.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Tujuan program ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana dan kesiagaan, kesiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yaitu mensosialisasi daerah rawan bencana, melaksanakan pembinaan terhadap sumberdaya aparatur pemadam kebakaran, memfasilitasi penanganan bahaya kebakaran dan dampak kebakaran dan memonitor wilayah rawan kebakaran dan dampak bahaya kebakaran. Kegiatan yang mendukung program pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana, yaitu responsibilitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota yang sigap dan terampil dan meningkatkan peran satlinmas dan Damkar. Dengan target Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran sebesar 60% dan capaian realisasi n-1 program sebesar 60%. Berikut kegiatan yang mendukung Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Bencana

Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran dengan nilai pagu Rp 200.000.000, Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan nilai pagu Rp 3.437.101.300, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan nilai pagu Rp 50.000.000, dengan target capaian Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil sebesar 100% dan capaian realisasi n-1 kegiatan sebesar 100%.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerahh

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 - 2026, maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel T- C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n - 2)	Tahun 2023 (n - 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n + 1)	Tahun 2022 (n - 2)	Tahun 2023 (n - 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci											
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	91,07		100%	100%	

	2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	di Provinsi										
	3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan											
	4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS											
	5	Tersedianya SOP dalam penegakkan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum											
	6	Tersedianya Sarana prasarana minimal											
2.	Indikator Kinerja PD												
	1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum			75	85	90	90	100		90	90	
	2	Meningkatkan peran petugas penegak produk hukum dalam penyidikan dan peyelidikan			75	85	90	90	100		90	90	
	3	Meningkatkan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum			85	90	90	90	100		90	90	
	4	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan mengenai Ketertiban Umum			85	90	90	90	100		90	90	

5	Peningkatan pemenuhan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			90	100	100	100	100		100	100	
6	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov.Kalsel			90	100	100	100	100		100	100	
7	Meningkatkan tanggung jawab dan tanggung jawab terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana			40	50	50	60	74		50	60	
8	Meningkatkan peran Satlinmas dan Damkar			40	50	50	60	73		50	60	

Hasil pencapaian indikator sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Produk Hukum Daerah

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 13 Kabupaten/Kota dengan penduduk yang heterogen, dan sangat rawan atas timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Kegiatan dalam mendukung upaya pengamanan dan penertiban tersebut antara lain patroli gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Polisi Pamong Praja sebagai aparaturnya Pemerintah Daerah, melaksanakan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menindaklanjuti permasalahan yang terjadi untuk diselesaikan/permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil ditindaklanjuti dengan **realisasi capaian kinerja 100%**

2. Meningkatkan Peran Petugas Penegak Produk Hukum Dalam Penyidikan dan Penyelidikan

Peran aktif penyidik (PPNS) untuk penyelidikan dalam menegakkan Produk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, agar Produk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dipedomani oleh masyarakat/aparatur, **dengan realisasi capaian kinerja 100%**

3. Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mencegah tindak kriminal dengan mengoordinasikan, membina dan mengendalikan bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah serta penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat/aparatur, agar memahami/mematuhi terkait sanksi dan pidana akibat dari pelanggaran yang dilakukan, **dengan realisasi capaian kinerja 100%**

C. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tujuan program ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu melaksanakan patroli pengamanan objek vital Pemerintah Provinsi dan pengamanan dan pengawalan pejabat Negara, mensosialisasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dan memfasilitasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi. Beberapa kegiatan yang mendukung program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain:

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan : *Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* dengan nilai pagu Rp. 15.976.635.750, umumnya program ini kebanyakan membayar honor petugas PTT/ jaga/ petugas pendukung kantrantibmas dari non PNS yang berjumlah 198 orang tetapi kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan suatu kondisi ketenteraman dan ketertiban umum baik berupa Pengamanan/ penegakkan Peraturan Daerah atau kegiatan Patroli wilayah serta Patroli Damkar sehingga diharapkan situasi yang kondusif di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan patroli pengamanan objek vital Pemerintah Provinsi dan pengamanan dan pengawalan pejabat Negara/VIP, yaitu wilayah/daerah yang dilaksanakan patrol untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan target 16.000 patroli dalam setahun, diharapkan capaian realisasi 100 % dan pengamanan objek vital dan pejabat Negara dan VIP, dengan target 7 objek, diharapkan capaian realisasi 100%.dan juga fasilitasi terhadap

keamanan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan bersinergitas terhadap TNI -POLRI.

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan nilai pagu Rp 1.010.183.000 Tujuan kegiatan ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kapasitas personel Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bersertifikat dan meningkat klasifikasinya. Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas aparaturnya, Tujuan dari Kegiatan ini yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur (Satpol PP, Linmas dan Damkar) Prov Kalsel dan aparaturnya Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mendapatkan uji kompetensi dan fungsional.

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan nilai pagu Rp. 1.000.000.000 Tujuan kegiatan ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu mensosialisasi/bimtek daerah rawan masalah sosial, melaksanakan pembinaan terhadap sumberdaya aparaturnya satlinmas.

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dengan nilai pagu Rp 50.341.508.100 dengan tujuan pembentukan Tim Kerjasama Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan serta hibak pilkada untuk TNI/POLRI .

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan nilai pagu Rp 500.000.000

dengan tujuan Melakukan penindakan gangguan trantibum dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan tetap bekoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganannya.

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan nilai pagu Rp 809.472.000 dengan tujuan Terpenuhinya sarana prasarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung dalam kegiatan penegakan trantibum tranmasy.

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan nilai pagu Rp 0 dengan tujuan tersusunnya SOP yang berkaitan dengan ketentuan pelayanan dalam penegakan perda maupun perkara.

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan nilai pagu Rp 99.999.800 dengan tujuan Menyediakan layanan akibat dari dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dengan nilai pagu Rp 150.000.000 dengan tujuan Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kab/kota tekait.

- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan :

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur denfan nilai pagu Rp 125.000.000 tujuan kegiatan ini adalah mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah serta penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yaitu melaksanakan sosialisasi produk hukum terkait sanksi administrasi dan pidana, pembinaan terhadap sekretariat/PPNS, penegakan produk hukum daerah dan memfalisitasi permasalahan terhadap pelanggaran produk hukum daerah. Beberapa kegiatan yang mendukung program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal.

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan nilai pagu Rp 300.000.000 tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan nilai pagu Rp 385.628.000 tujuan kegiatan ini adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang meliputi sanksi administrasi dan pidana, pembinaan terhadap, penegakan produk hukum daerah dan pelanggaran produk hukum daerah.

- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan :

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan nilai pagu Rp 110.000.000 tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan kapasitas pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda.

Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dengan nilai pagu Rp 100.000.000 tujuan kegiatan ini adalah melakukan pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif.

2. PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Tujuan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran kegiatan ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana dan kesiagaan, kesiapan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yaitu mensosialisasi daerah rawan bencana, melaksanakan pembinaan terhadap sumberdaya aparatur pemadam kebakaran, memfasilitasi penanganan bahaya kebakaran dan dampak kebakaran dan memonitor wilayah rawan kebakaran dan dampak bahaya kebakaran. Kegiatan yang mendukung program pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana, yaitu responsibilitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota yang sigap dan terampil dan meningkatkan peran satlinmas dan Damkar.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub kegiatan :

Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran dengan nilai pagu Rp 407.139.000 tujuan dari kegiatan ini adalah Fasilitasi penanganan bahaya kebakaran dan dampak kebakaran, yaitu kejadian kebakaran yang di fasilitasi penanganannya.

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan nilai pagu Rp 2.549.996.800 tujuan dari kegiatan ini adalah Pembinaan terhadap sumberdaya aparatur pemadam kebakaran baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota,yaitu anggota pemadam kebakaran yang terampil dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan nilai pagu Rp 550.000.000 dengan tujuan Terpenuhinya sarana prasarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri untuk memenuhi standar keselamatan personil di lapangan.

Tabel T- C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariat an		12.508.853.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariat an		12.508.853.300	
5	1	1	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan		17.120.300	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan		17.120.300	
5	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.610.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.610.000	
5	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.510.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.510.300	

5	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentasi penyerapan anggaran Satpol PP & Damkar		9.647.322.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentasi penyerapan anggaran Satpol PP & Damkar		9.647.322.000	
5	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	9.464.322.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	9.464.322.000	
5	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	183.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	183.000.000	
5	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		255.665.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		255.665.000	
5	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	196.380.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	196.380.000	
5	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarbaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	59.285.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarbaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	59.285.000	
5	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		1.116.659.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		1.116.659.000	
5	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48.000.000	
5	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	338.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	338.200.000	

5	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20.980.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20.980.000	
5	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9.500.000	
5	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	699.979.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	699.979.000	
5	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		743.252.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		743.252.000	
5	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	573.632.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	573.632.000	
5	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	52.440.000	Pengadaan Mebel	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	52.440.000	
5	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	117.180.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	117.180.000	
5	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		194.181.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		194.181.000	

5	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	34.880.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	34.880.000	
5	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	159.301.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	159.301.000	
5	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		534.654.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		534.654.000	
5	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	261.114.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	261.114.000	
5	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	273.540.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	273.540.000	
5	1	2	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah		70.908.426.650	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah		70.908.426.650	

5	1	2	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti		69.887.798.650	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti		69.887.798.650	
5	1	2	1.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	15.976.635.750	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	15.976.635.750	
5	1	2	1.01	2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	500.000.000	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	500.000.000	
5	1	2	1.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	150.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	150.000.000	

5	1	2	1.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1.000.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1.000.000.000	
5	1	2	1.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1.010.183.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1.010.183.000	
5	1	2	1.01	6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	50.341.508.100	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	50.341.508.100	
5	1	2	1.01	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	809.472.000	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	809.472.000	
5	1	2	1.01	8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	-	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	-	

5	1	2	1.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	99.999.800	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	99.999.800	
5	1	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah		810.628.000	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah		810.628.000	
5	1	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	125.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	125.000.000	
5	1	2	1.02	2	Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	300.000.000	Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	300.000.000	
5	1	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	385.628.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	385.628.000	

5	1	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase petugas ppns/sekr dalam penyelidikan dan penyidikan Pertahun		210.000.000			Persentase petugas ppns/sekr dalam penyelidikan dan penyidikan Pertahun		210.000.000	
5	1	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	110.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	110.000.000	
5	1	2	1.03	2	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan daerah, Dukungan Pelaksanaan sidang ditempat, Penguatan Sekretariat bersama PPNS	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	100.000.000	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan daerah, Dukungan Pelaksanaan sidang ditempat, Penguatan Sekretariat bersama PPNS	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	100.000.000	
5	1	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran		3.507.135.800	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran		3.507.135.800	
5	1	4	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Persentase Responsibilit as Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota		3.507.135.800	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Persentase Responsibilit as Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota		3.507.135.800	

							yang Sigap dan Terampil					yang Sigap dan Terampil			
5	1	4	1.01	1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	407.139.000	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	407.139.000	
5	1	4	1.01	3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	2.549.996.800	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	2.549.996.800	
5	1	4	1.01	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	550.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	550.000.000	
TOTAL PAGU ANGGARAN									86.924.415.750	TOTAL PAGU ANGGARAN				86.924.415.750	

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T- C.32

**USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100%	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentasi penyerapan anggaran Satpol PP & Damkar	100%	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarbaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	100%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	
	Pengadaan Mebel	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	100%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti	100%	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsil	Dokumen	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan	Dokumen	

		Semua Kelurahan	Ketertiban Umum		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	
	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	

	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah	100%	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	
	Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase petugas ppns/sekr dalam penyelidikan dan penyidikan Pertahun	100%	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	

	Pemberkasan Administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat bersama PPNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil	100%	
	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pemerintah telah menyusun sasaran pokok RPJMN 2015-2019, diantaranya adalah tata kelola dan reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam:

1. Pemantapan politik dalam negeri melalui meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; dan
2. Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dengan agenda prioritas membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah disusun misi ke dua RPJM 2021-2026, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik, dengan tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu dari sasaran dari tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi yang telah disusun antara lain:

1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik;
2. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personel;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dan

g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Untuk mewujudkan capaian dari misi empat RPJMD tahun 2021-2026 tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan pada rencana kerja tahun 2023 akan melaksanakan sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Gambar 3.1

Keterkaitan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Misi RPJPN 2005-2025	Misi Pembangunan 2015-2019	9Agenda Prioritas (Nawa Cita)	Isu Prioritas RPJMN 2015-2019	Arah Kebijakan RKPD 2020	Target Pembangunan RKPD 2020	Renja SKPD Satpol PP dan Damkar 2020	Program Prioritas RKPD 2020
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi- institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.	Pemantapan Politik dalam Negeri melalui meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil	Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi dengan nilai Lakip A	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah
			Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran
						Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	
						Program Perlindungan Masyarakat	
						Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur	

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi Perangkat Daerah

a. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selaku SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan mendukung terwujudnya RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan (2021-2026) yaitu:

**“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan
Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG
IBUKOTANEGARA”**

Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah
2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang tertuang dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 dan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum

Daerah, yaitu masyarakat/aparatur yang paham/patuh produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun **sasaran** yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah **tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah**, dengan indikator:

1. Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil ditindaklanjuti
2. Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan ketentraman dan ketertiban umum
3. Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum
4. Persentase PPNS/Sekretariat dalam penyidikan dan peyelidikan.

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran,

yaitu kesadaran masyarakat pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan akan dampak yang ditimbulkan dari bahaya kebakaran

Adapun **sasaran** yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah **tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran**, dengan indikator:

1. Tingkat responsibilitas aparatur satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran Kabupaten/Kota yang sigap dan terampil
2. Persentasi satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran Kabupaten/Kota yang aktif dalam penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana
3. Persentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bersertifikat
4. Persentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meningkat klasifikasinya.

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluar an Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
											Rencana Tahun 2023						Perkiraan Tahun Maju Tahun 2024		
											Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
											Prog ram	Kelua ran Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									86.924.415.750			35.863.465.850		
5	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									86.924.415.750			35.863.465.850		
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariata n								12.508.853.300			11.951.213.000		

5	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan						17.120.300					23.999.900
5	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menigkatnya Laporan dan Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Kota Banjarbaru	100%	5 Dokumen	100%	10.610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	14.000.000
5	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkordinasinya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjarbaru	100%	1 Dokumen	100%	6.510.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	9.999.900
5	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyerapan anggaran Satpol PP & Damkar						9.647.322.000					9.147.900.000
5	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	Orang/Bulan	100%	9.464.322.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	8.970.900.000

5	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	Dokumen	100%	183.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	177.000.000
5	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar							255.665.000					156.380.000
5	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	Paket	100%	196.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	156.380.000
			1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	Orang	100%	59.285.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	156.380.000
5	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan							1.116.659.000					1.142.684.900

							hkan Satpol PP & Damka r												
5	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Paket	100%	48.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	48.000.000
5	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	12 Paket	100%	338.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	365.000.000
5	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Paket	100%	20.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	18.697.900
5	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Dokumen	100%	9.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	11.000.000

5	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Laporan	100%	699.979.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	699.987.000
5	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar							743.252.000					743.897.200
5	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Unit	100%	573.632.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	572.650.000
5	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Paket	100%	52.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	52.447.200
5	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Unit	100%	117.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	118.800.000

								an											
5	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar							194.181.000					199.311.000
5	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	12 Laporan	100%	34.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	40.000.000	
5	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Laporan	100%	159.301.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	159.311.000	

5	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar							534.654.000					537.040.000
5	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Unit	100%	261.114.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	262.590.000
5	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100 %	Unit	100%	273.540.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	274.450.000
5	1	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah								70.908.426.650					21.412.252.850

5	1	2	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presensi permasalahan trantibum yg berhasil ditindak lanjuti						69.887.798.650					20.911.624.850
5	1	2	1.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Kasus	100%	15.976.635.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	17.804.635.750
5	1	2	1.01	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Kasus	100%	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	253.500.000

								Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan										
5	1	2	1.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100%	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	150.000.000

5	1	2	1.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberd ayaan Perlindun gan Masyara kat dalam rangka Ketenter aman dan Ketertiba n Umum	Tingkat kepatuh an Terhada p Produk Hukum Daerah	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	Dokum en	100%	1.000.000.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Meningka tnya kepatuha n Masyarka t Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	869.643.500
5	1	2	1.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongp raja dan Satuan Perlindun gan Masyara kat yang Ditingkat kan Kapasita sanya	Tingkat kepatuh an Terhada p Produk Hukum Daerah	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	Orang	100%	1.010.183.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Meningka tnya kepatuha n Masyarka t Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	997.890.800
5	1	2	1.01	6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksan aan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraa n dalam Teknik Pencega han Kejahata n	Tingkat kepatuh an Terhada p Produk Hukum Daerah	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	Dokum en	100%	50.341.508.100	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Meningka tnya kepatuha n Masyarka t Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	150.000.000

5	1	2	1.01	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum			Jumlah Sarana dan Prasarana ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Unit	100%	809.472.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	565.954.800
5	1	2	1.01	8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	60.000.000
5	1	2	1.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Perkada yang Terlayani	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100%	99.999.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	60.000.000
5	1	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah							810.628.000					350.628.000

5	1	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100%	125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	125.000.000
5	1	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100%	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	125.628.000
5	1	2	1.02	2	Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100%	385.628.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	100.000.000

5	1	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persen tase petugas ppns/s ekr dalam penyeli dikan dan penyidi kan Pertahun						210.000.000					150.000.000
5	1	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Laporan	100%	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	50.000.000

5	1	2	1.03	2	Pemberkasan Administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat bersama PPNS		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Dokumen	100%	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	100.000.000
5	1	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran							3.507.135.800				2.500.000.000
5	1	4	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil						3.507.135.800				2.500.000.000

5	1	4	1.01	1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100%	407.139.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	200.000.000
5	1	4	1.01	3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100%	2.549.996.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	2.050.000.000
5	1	4	1.01	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Unit	100%	550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	250.000.000
TOTAL ANGGARAN													86.924.415.750				35.863.465.850		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program, dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan program dan kegiatan tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 3 (tiga) program urusan wajib kegiatan SKPD dan 1 (satu) program prioritas fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan sub kegiatannya .

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 6. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan

ketertiban umum

8. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
9. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 3. Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 2. Pemberkasan Administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat

**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 1. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

TABEL
PRAKIRAAN MAJU RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Perkiraan Tahun Maju Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja		
										Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.863.465.850
5	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							35.863.465.850
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan						11.951.213.000
5	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan					23.999.900

5	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan dan Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	14.000.000
5	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	9.999.900
5	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentasi penyerapan anggaran Satpol PP & Damkar					9.147.900.000
5	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	8.970.900.000
5	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	177.000.000
5	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar					156.380.000
5	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	156.380.000

			1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	156.380.000
5	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar					1.142.684.900
5	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	48.000.000
5	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	365.000.000
5	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	18.697.900
5	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	11.000.000
5	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	699.987.000

5	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar					743.897.200
5	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	572.650.000
5	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	52.447.200
5	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	118.800.000
5	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar					199.311.000
5	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	40.000.000
5	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	159.311.000

5	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar					537.040.000
5	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	262.590.000
5	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	274.450.000
5	1	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah						21.412.252.850
5	1	2	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presentasi permasalahan trantibum yg berhasil ditindak lanjuti					20.911.624.850

5	1	2	1.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	17.804.635.750
5	1	2	1.01	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	253.500.000
5	1	2	1.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	150.000.000

5	1	2	1.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	869.643.500
5	1	2	1.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	997.890.800
5	1	2	1.01	6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	150.000.000
5	1	2	1.01	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	565.954.800
5	1	2	1.01	8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	60.000.000
5	1	2	1.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum	100%	60.000.000

								Terlayani		Daerah		
5	1	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah					350.628.000
5	1	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	125.000.000
5	1	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	125.628.000
5	1	2	1.02	2	Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	100.000.000

5	1	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase petugas ppns/sekr dalam penyelidikan dan penyidikan Pertahun					150.000.000
5	1	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	50.000.000
5	1	2	1.03	2	Pemberkasan Administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat bersama PPNS			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	100.000.000
5	1	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran						400.000.000

5	1	3	01:02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentasi Satlinmas dan Damkar kab/kota yang aktif dalam penanganan trantib dan, bahaya kebakaran dan bencana					400.000.000
5	1	3	01:02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Jumlah Anggota Satpol PP & Damkar yang Terampil	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	200.000.000
5	1	3	01:02	5	Pengelolaan Risiko Bencana			Jumlah kejadian kebakaran yg di falsilitasi penanganannya	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	200.000.000
5	1	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran						2.500.000.000
5	1	4	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil					2.500.000.000
5	1	4	1.01	1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	200.000.000

5	1	4	1.01	3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	2.050.000.000
5	1	4	1.01	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	250.000.000
TOTAL ANGGARAN												35.863.465.850

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 merupakan dokumen rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan selama tahun 2024, fungsi rencana kerja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam rencana strategis SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun anggaran 2024 dan sebagai pengukur

rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam satu tahun ke depan.

Banjarbaru, 21 Juli 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan,**



Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

Pembina Utama Madya
NIP 19650909 198602 1 005